

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang aktif dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang kehidupan termasuk bidang budayanya, menuntut dikembangkannya nilai budaya pembangunan. Kekuatan budaya akan mempengaruhi iklim etis semua organisasi yang ada dan juga perilaku etis dari para anggota organisasi. Budaya organisasi yang paling mungkin membentuk standar etis yang tinggi adalah budaya yang tinggi dalam mentoleransi resiko baik secara rendah atau sedang dalam keagresifan serta yang fokus pada sarana dan hasil.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan undang-undang UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 hingga pasal 36. (PP No.7 Tahun 2021)

*Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 hingga pasal 36. Untuk UMKM yang baru akan didirikan, terdapat **kriteria modal UMKM** adalah usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maksimal sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No.7 Tahun 2021)*

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital maka dari itu pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. (BKPM, 2022)

Salah satu sektor yang sangat terpuuk oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerak turunnnya perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan profit usaha menurun secara drastis, penurunan profit ini terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi seperti bahan

baku, transportasi, tenaga kerja dan biaya lain-lain sementara penjualan menurun. (Humas LIPI,2020)

UMKM sebagai sebuah organisasi dituntut memiliki kinerja yang baik. Kinerja menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan yang berdampak terhadap pelayanan secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Agar kinerja dari suatu organisasi itu baik maka diperlukan alat ukur untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja dari organisasi itu sendiri (Edy Wahyu Wibowo, 2017).

Kinerja UMKM merupakan hasil kerja atau usaha yang dicapai oleh seseorang atau kelompok berdasarkan deskripsi tugas dan perannya masing-masing selama periode tertentu. Kinerja UMKM dapat diukur dari segi omset penjualan yang diraih, perkembangan aset, dan laba bersih yang didapatkan pada periode tertentu (Jubaedah & Destiana, 2016). Faktor internal yang mampu meningkatkan kinerja UMKM meliputi produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Besaran modal yang dimiliki oleh UMKM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM (Kumalasari & Haryono, 2019).

Kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena didukung dengan adanya kebijakan atau

program yang lebih baik lagi atas sumber daya yang digunakan dalam organisasi. Alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja di sektor publik terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan ketercapaian tujuan.

Salah satu alat untuk mengukur kinerja adalah dengan menggunakan *balance scorecard*. *Balanced Scorecard* adalah metode untuk mengukur kinerja seseorang atau kelompok atau organisasi dengan menggunakan kartu untuk mencatat skor hasil-hasil kinerja. Melalui *Balanced Scorecard* dilakukan pendekatan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yaitu bila ditinjau dari segi internal perusahaan (perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan), ditinjau dari segi eksternal perusahaan (perspektif pelanggan dan perspektif keuangan). Tetapi bila ditinjau dari segi proses dan orang (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif pelanggan), dan dari segi proses (perspektif keuangan, perspektif internal proses). (Edy Wahyu Wibowo, 2017).

Karawang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa barat yang merupakan salah satunya kota tujuan wisata kuliner yang diminati di Jawa Barat. Salah satunya Kota Karawang sebagai daerah penyangga Ibu Kota. Perkembangan di Kota Karawang yang dahulu kota lumbung padi menjadi kota industri, sehingga hal ini bisa kita lihat banyaknya bisnis-bisnis dalam bidang perkantoran dan bidang pariwisata yang muncul juga berkembang di Kota Karawang, di antaranya bisnis kuliner. Dengan berbagai konsep dan tema yang berbeda dengan ciri khasnya tersendiri untuk menarik para

konsumen. Sehingga mempunyai daya tarik tersendiri agar tidak pernah kehilangan pengunjung. Apalagi dalam bidang bisnis kuliner yang dimana orang pasti membutuhkannya, salah satunya adalah restoran. Tuntunan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Karawang.

Fenomena pasca pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 lalu banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa Covid-19 sangat berdampak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di karawang. Selama tahun 2021 lalu, diketahui sebanyak 600 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM karawang tutup termasuk sektor kuliner. Sebanyak 94.512 UMKM yang masih aktif ini terdiri dari UMKM industri sebanyak 3.356, UMKM industri rumah tangga 15.538 UMKM perdagangan 59.931, UMKM jasa sebanyak 16.277 dan UMKM perdagangan yang paling banyak ditutup dan tidak berjualan lagi akibat terjadinya berbagai masalah seperti masalah logistik, kekurangan tenaga kerja, dan yang paling utama adalah menurunnya permintaan konsumen. Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi Covid-19.(sumber: pasundanekspres.co)

Fenomena selanjutnya, Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Buchori menyatakan, selama pandemi Covid-19 banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 84%. Hal ini sebagai imbas dari kebijakan pembatasan sosial

berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah untuk menekan laju penularan virus Covid-19. Secara umum, sebanyak 8 dari 10 pelaku UMK juga cenderung mengalami penurunan permintaan. Sedangkan, 62,21% UMK menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional yang dimana sektor UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Tercatat, ada sebanyak 65 juta pelaku UMKM di Tanah Air yang menyumbang 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional untuk menghadapi dampak tekanan pandemi terhadap sektor UMKM, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor ini antara lain melalui insentif final UMKM kepada lebih dari 130 ribu pelaku UMKM senilai Rp 0,80 triliun. Selanjutnya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 284,9 triliun bagi 7,51 juta debitur kemudian kebijakan restrukturisasi kredit di sektor UMKM juga mencapai Rp

276,36 triliun yang berasal dari 3,3 juta debitur. (sumber: www.cnbcindonesia.com/)

Adapun fenomena selanjutnya, keluhan masyarakat kecamatan telagasari akibat adanya oknum RT pungli bantuan UMKM. Seperti diberitakan sebelumnya, pandemi Covid-19 yang berlangsung lama hingga kini masih belum berakhir maka dari itu berdampak luas pada perekonomian, tidak luput bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ikut merasakan dampaknya bukan hanya harus gigit jari karena penurunan pendapatan, dan beberapa pelaku UMKM bahkan harus rela gulung tikar. Dari kenyataan tersebut, pemerintah kemudian termotivasi untuk membantu para pelaku usaha agar perekonomian tetap berjalan. Salah satu upaya

yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan langsung berupa bantuan pemerintah bagi pelaku usaha (BPUM BanPres Produktif) sebesar Rp 2,4 juta.

Namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda pelaku UMKM tidak menerima uang dengan jumlah yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta. Pasalnya, dalam pengambilan ada oknum yang bermain dengan dalih, bila tidak mau dipotong sebesar Rp 400 ribu belum pasti kapan cairnya, namun bila mau dipotong Rp 400 ribu, uang itu bisa langsung cair. (sumber : www.hariansederhana.com)

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan kinerja umkm yang belum optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi bahwa pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung kegiatan operasional dalam suatu organisasi. (Chaniago, 2019). Pengendalian Intern merupakan salah satu alat untuk melakukan memonitor sumber daya insani di UMKM. Saat ini, pengendalian intern dianggap sebagai cara untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* dan melindungi sumber daya fisik maupun *intangibile* yang pada akhirnya akan menghasilkan efisiensi dan berfungsinya bisnis dengan baik (Cika, 2017). Pengendalian Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2013:164). Adapun pengendalian internal adalah sebuah

kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin [informasi akuntansi](#) yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. (Hery 2016:159)

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja terhadap suatu organisasi adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi maka untuk mendapatkan kinerja yang baik dari seorang karyawan, sebuah organisasi harus dapat memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan kata lain, kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. (Sri Gustina Pane dan Fatmawati, 2017). Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Diantara komitmen organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif dimana kinerja yang baik pasti dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi, semakin tinggi derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. (Angel dan Perry dalam Kurniawan, 2013).

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Triatna 2015:120). Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan

organisasi. Sehingga komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik lagi (Kreitner dan Kinicki dalam Diana dkk, 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dean Ratnanta Chaniago dan Ikhsan Budi Raharjo tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Organisasi (Survey pada PT. Kereta Api Indonesia). Dan penelitian yang dilakukan oleh Fadli Dahlan dan Farid Madjodjo tahun 2020 dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Surver Pada UMKM Sektor Kuliner Di Kabupaten Karawang)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penendalian intern pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

2. Bagaimana komitmen organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
3. Bagaimana kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah h (UMKM) di Kabupaten Karawang.
4. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
5. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
6. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Daerah Kabupaten Karawang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penendalian intern pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

2. Untuk mengetahui komitmen organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada materi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi pada UMKM di Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang lebih dan menjadi acuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan agar dapat meningkatkan kinerja usahanya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan UMKM, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang Sistem Akuntansi mengenai UMKM, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap kinerja organisasi,

serta memperluas wawasan pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik lagi kedepannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku UMKM di Kabupaten Karawang, sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkan proposal penelitian hingga selesai.